



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 06 Februari 2023

Halaman: 4

KEMISKINAN

Penghasilan Rp 1,8 Juta, Ada Kulkas dan HP Tak Masuk KMS

JOGJA, Radar Jogja - Pendataan verifikasi penerima Kartu Menuju Sehat (KMS) di Kota Jogja, masih menemui masalah. Fraksi PKS DPRD Kota Jogja menemui warga Kota Jogja yang tercoret dari daftar penerima manfaat KMS, meski sebenarnya layak.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jogja dari Fraksi PKS Bambang Anjar Jalumurti mencontohkan, ada satu data warga hasil sampling yang tercoret dari daftar penerima KMS 2023, ternyata kondisinya masih jauh dari mandiri. Diungkapkannya, keluarga itu, hanya berpenghasilan total Rp 1,8 juta per bulan dan harus menanggung tiga orang



Bambang Anjar J

anak yang semua masih sekolah. Tapi, dia dianggap mandiri hanya karena mempunyai kulkas dan *handphone* (HP). "Padahal, kulkas yang dimiliki itu untuk kebutuhan produksi dan HP untuk keperluan sekolah anak-anaknya," jelasnya Jumat (3/2). "Mereka juga tinggal di dalam satu ruangan, harus menanggung

sekolah tiga anak. Itu, kan, sangat jauh dari kecukupan, karena UMK Kota Jogja saja sudah di atas Rp 2 juta. Tapi, dari hasil verifikasi, mereka termasuk kriteria mandiri," imbuh Bambang.

Dia mengatakan, sejatinya daftar penerima KMS untuk 2023 mengalami peningkatan, dari sekitaran 15 ribu menjadi 17.451. Tapi, yang sangat disayangkan, terdapat warga yang tercoret, padahal statusnya belum seutuhnya keluar dari jerat kemiskinan. "Artinya, ada tambahan sekitar 1.600an, tapi banyak yang tercoret. Kami sudah raker bersama Dinas, serta melihat paparan data. Di situ data yang tercoret dari KMS diuji bersama," urainya.

Pihaknya mendorong Pemkot Jogja untuk melakukan evaluasi, terkait mekanisme dan indikator penentuan penerima KMS. Sejauh ini, pihaknya berupaya mengadvokasi sejumlah KK yang tercoret agar tercakup jaminan sosial, termasuk di sektor pendidikan juga. "Dinas kita dorong untuk mendata, kemarin yang dapat KMS berapa, yang tercoret berapa, terus buka posko pengaduan, supaya warga bisa mengadu, biar disurvei pemkot," tambah Bambang.

Sub Koordinator Substansi Data dan Informasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Transmigrasi Kota Jogja, Agus Budi, mengatakan, data KMS yang bersumber dari validasi sejak 2022 sudah *fix*. Bahkan, anggaran yang bersumber dari APBD Kota Jogja pun telah ditetapkan untuk periode setahun ke depan. "Jadi, kami tidak bisa menambah. Tapi, kalau ada usulan yang dirasa itu tidak tepat sasaran, kami bisa mencabutnya, setelah ada bukti yang kuat," cetusnya, ketika menerima langsung audiensi dari warga. (pra/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005